

PROGEMATIKA PENERAPAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI ERA DIGITAL

Oleh:

Erniwati¹

Siti Aminah²

Dedi Setiyadi³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec, Kamal, Kab. Bangkalan Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: erniwatiwati904@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to provide fiduciary guarantees electronically or online, considering the current reality that technological advances have brought great benefits to human life in the economic, social and legal fields. Advances in electronic guardianship registration include: Now available on the Internet. This is a better trust registration service compared to the traditional manual registration system, and because the trust registration is an online system, it is very easy to register the trust security and it does not take much time to register the trust security. Sometimes it only takes a few minutes. Based on research, it is known that registration of trust bonds through an online system is regulated in the Law concerning Electronic Issuance of Trust Bonds of the Republic of Indonesia and Regulation Number 9 of 2013 as well as the Regulation of the Minister of Human Rights. curatorial link. Number 10 of 2013 Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia concerning Guarantees for the Electronic Registration System of Guardians. The legal consequence of not registering a trust guarantee agreement in the online system is that the trust guarantee agreement is not drawn up in such a way that the agreement does not contain guarantee characteristics such as distribution of assets or privileges. He is a credit guarantee creditor and has no binding power.*

Keywords: *Fiduciary, Guarantee, Electronic.*

Received June 11, 2024; Revised June 18, 2024; June 21, 2024

*Corresponding author: erniwatiwati904@gmail.com

PROGEMATIKA PENERAPAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI ERA DIGITAL

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jaminan fidusia secara elektronik atau online, mengingat kenyataan saat ini bahwa kemajuan teknologi telah membawa manfaat yang besar untuk kehidupan manusia baik dalam segi ekonomi, sosial dan hukum. Kemajuan dalam pendaftaran perwalian elektronik meliputi: Sekarang tersedia di Internet. Ini adalah layanan pendaftaran jaminan kepercayaan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem pendaftaran manual tradisional, dan karena pendaftaran jaminan kepercayaan adalah sistem online, maka sangat mudah untuk mendaftarkan jaminan kepercayaan dan tidak memakan banyak waktu untuk mendaftarkan jaminan kepercayaan. Terkadang hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pendaftaran obligasi perwalian melalui sistem online diatur dalam Undang-Undang tentang Penerbitan Obligasi Perwalian Republik Indonesia Secara Elektronik dan Peraturan Nomor 9 Tahun 2013 serta Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia. tautan kuratorial. Nomor 10 Tahun 2013 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Jaminan Sistem Registrasi Elektronik Wali. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya perjanjian jaminan perwalian dalam sistem online adalah perjanjian jaminan perwalian tidak dibuat sedemikian rupa sehingga perjanjian tersebut tidak memuat ciri-ciri penjaminan seperti pembagian harta atau keistimewaan. Ia adalah kreditur penjaminan kredit dan tidak mempunyai kuasa mengikat.

Kata Kunci: Jaminan, Fidusia, Elektronik.

LATAR BELAKANG

Saat ini kita (manusia) hidup dalam peradaban modern, yang mana kondisinya serba cepat, efektif dan efisien, serta pengaruh perubahan zaman yang cepat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah tiba dalam segala aspek, termasuk hilangnya batasan ruang dan waktu antar negara.

Sertakan pedoman mengenai lembaga perwalian. Lembaga perwalian hadir sebagai solusi / jawaban untuk mengentaskan berbagai macam problem yang dihadapi masyarakat sebagai upaya untuk mendapatkan kredit dengan menggunakan agunan fisik. Perwalian bermanfaat karena debitur mengalihkan kepemilikan harta benda kepada kreditur, sedangkan harta itu sendiri tetap berada di bawah penguasaan debitur.

Saat membiayai properti dengan jaminan perwalian, diperlukan pendaftaran pada Daftar Jaminan Perwalian dan membuat akta notaris (akta jaminan perwalian). Jika Anda tidak mendaftar, Anda tidak akan dapat menerima layanan dan manfaat yang telah ada aturannya dalam Ayat 3, pasal 27 Undang-Undang Perwalian dan Penjaminan. “Berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat ini, kami mengadakan perjanjian penjaminan perwalian.” Tidak terdaftar dan tidak mempunyai hak prioritas baik dalam keadaan pailit dan/atau likuidasi. ”

Sejak disahkannya Permenkhum Ham tepatnya Nomor 9 Tahun 2013 yang menjelaskan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Jaminan Perwalian Secara Elektronik. Perpindahan pendaftaran tradisional ke pendaftaran online masuk akal untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus persyaratan fidusia. Adanya persyaratan pendaftaran perwalian secara online tidak hanya lebih efisien, tetapi juga sangat berguna saat ini, husunya pada waktu pandemi COVID-19, ketika masyarakat diperintahkan / diminta untuk menjaga jarak satu sama lain. Pendaftaran online menghilangkan kebutuhan untuk mengantri dan membentuk kerumunan. Selain itu, pendaftaran wali amanat secara online juga dinilai lebih transparan dan cepat, serta seluruh data pendaftaran jaminan amanah tercatat di database AHU (Kejaksaan Agung) di tingkat nasional, sehingga prinsip keterbukaan dapat tetap terjaga. Ahli.

Selain itu, sejak diperkenalkannya pendaftaran jaminan perwalian secara elektronik, permohonan pendaftaran jaminan perwalian tidak lagi diajukan ke kantor wilayah sesuai dengan Pasal 2 Surat Edaran Jaksa Agung tahun 2013. Terkait dengan operasionalisasi sistem pendaftaran perwalian secara elektronik (online), dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kantor pendaftaran perwalian di seluruh Indonesia tidak lagi menerima permintaan pendaftaran penjaminan perwalian secara manual. namun bagi pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara manual, akan diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik sebagai pengganti pemenuhan tugas dan kewajibannya. Permohonan pendaftaran jaminan kepercayaan yang dilakukan secara elektronik hanya dapat diajukan secara terpusat kepada Direktorat AHU, namun sebagai prasyaratnya, kantor wilayah hanya menerima username dan password rahasia dengan tertulis dari Direktorat AHU,

PROGEMATIKA PENERAPAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI ERA DIGITAL

tergantung pada bidang pekerjaannya. Untuk pendaftaran elektronik: Tanda tangan sertifikat keaslian.¹

Berdasarkan uraian di atas, artikel yang dibuat oleh penulis ini terpusat pada bagaimana pengimplementasian / penerapan program / kebijakan jaminan fidusia terkait pelaksanaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia di era digital ini.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritik pendaftaran keamanan perwalian secara online menitik beratkan pada pelaksanaan pendaftaran keamanan perwalian secara elektronik (online) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015. Pendaftaran obligasi fidusia secara online dilakukan melalui sistem online yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem ini memungkinkan pendaftaran jaminan perwalian secara elektronik melalui website ahu.go.id yang dapat diakses oleh notaris dan pemohon pendaftaran jaminan perwalian.

Proses Pendaftaran Jaminan Kerahasiaan Secara Online

1. Permohonan Pendaftaran Jaminan Kerahasiaan: Pemohon Pendaftaran Jaminan Kerahasiaan mengisi Formulir Pendaftaran Jaminan Kerahasiaan secara online melalui website ahu.go.id.
2. Pembayaran Biaya Pendaftaran: Pemohon pendaftaran *trust debenture* harus membayar biaya pendaftaran *trust debenture* melalui sistem online.
3. Penghapusan ikatan perwalian: Pengurus, kuasanya atau wakilnya harus memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pencabutan ikatan perwalian selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pencabutan ikatan perwalian

Fasilitator dan Disinsentif :

1. Fasilitator: Jaminan kerahasiaan pendaftaran secara online menjamin kepastian hukum dan efisiensi proses pendaftaran.

¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 30.

2. Faktor Pencegahan: Pemotongan dan pendaftaran jaminan perwalian membutuhkan biaya yang cukup besar, itulah sebabnya beberapa lembaga keuangan tidak mendaftarkan wali.

Efektivitas *Online Trust Registry*

Online Trust Registry telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan hukum terkait jasa notaris. Sistem online ini memungkinkan notaris untuk mencetak langsung akta obligasi perwalian melalui website ahu.web.id sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendaftaran obligasi perwalian.

Jadi Pendaftaran jaminan kepercayaan secara online menjamin kepastian hukum dan efisiensi dalam proses pendaftaran. Namun biaya untuk melakukan pemotongan dan pendaftaran jaminan memerlukan biaya yang cukup besar, itulah sebabnya beberapa lembaga keuangan tidak mendaftarkan wali. Sistem berbasis web ini memungkinkan notaris untuk langsung mencetak sertifikat obligasi perwalian, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendaftaran obligasi perwalian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library, yaitu mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis mengambil data dari sumber sekunder yang didapatkan dari buku dan jurnal terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan fidusia manual

Kepercayaan merupakan suatu sistem yang awalnya dari hukum perdata Barat, Dimana terkait keberadaan dan perkembangannya berhubungan dengan hukum perdata. Istilah "fidusia" sering disebut dalam bahasa Belanda sebagai "Low Fiduciary Eigen-Dom Overdracht" (FEO) dan dalam bahasa Inggris sebagai "Fiduciary Transfer of Ownership" dan mengacu pada pengalihan hak milik Masu oleh pemegang fidusia.²

² Ahmad musaddad , *hukum jaminan perspektif hukum positif dan hukum islam* : literasi Nusantara hal.117,. 2020

PROGEMATIKA PENERAPAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI ERA DIGITAL

Jika dilihat dari asal katanya fidusia berasal dari Bahasa latin, yakni *fides* yang berarti kepercayaan. Hubungan hukum yang timbul antara si pemberi dan si penerima fidusia merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada sebuah kepercayaan. terkait masalah hal ini debitur mempercayai bahwa kreditur pasti akan mengembalikan hak miliknya atas barang yang telah diserahkan setelah utang tersebut dilunasi, begitujuga sebaliknya. Kreditur yakin bahwa debitu pasti menggunakan barang jaminan yang ada dlam kekuasaaannya dengan baik..³

Pendaftaran Jamina fidusia di atur dalam pasal 11-18 undang- undang No. 42 tahun 1999 yang berisi penjelasan tentang jaminan fidusia dan juga ada di peraturan pemerintah No. 82 tahun 2000 mengenai tata cara / prosedur pendaftaran jaminan fidusia dan tentang berpa biaya pembuatan akta jaminan fidusia tersebut. Peraturan pemerintah tersebut memiliki empat bab dan 14 pasal. Hal- hal yang tertuang didalamnya adalah tentang pendaftaran fidusia, tata cara memperbaiki sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan / penghapusan pendaftaran, dan cara penggantian sertifikat.

Di Dalam pasa 11 undang undang No. 42 1999 yang menjelaskan tentang jaminan fidusia, disitu terdapat ketentuan bahwa semua bennda baik yang berada di dalam NKRI maupun diluar NKRI yang telah dibebani jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan. Dahulu memang pendafrtan dilakukan dikantor pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran fidusia tersebut didirikan dinjakarta yang wilayah kerjanya mencakup republic Indonesia. Tetapi sekarang kantor pendaftaran jaminan fidusia sudah dibentuk disetiap provinsi yang ada di Indonesia. Kantor pendaftaran jaminan fidusia menjadi tugas yang lingkupnya berada di tugas tugas departemen kehakiman dan juga hak asasi manusia.⁴

konteks penjaminan utang,kita harus mengetahui apa saja yang terkandung dalam undang-undang penjaminan dalam ketentuan hukumnya, sehingga para pihak yang mengajukan tuntutan penjaminan kredit dapat melindungi kepentingannya.⁵

Jamina fidusia online

Namun sejak disahkannya Permenkhum Ham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Jaminan Perwalian Secara Elektronik. Berdasarkan poin 2 Surat yang diEdarkan oleh Jaksa Agung Nomor AHU - 06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang

³ Supanto, *hukum jaminan fidusia prinsip publishitas pada jaminan fidusia*, (Garudhawaca , 2015), hal.34

⁴ Munir Fuady, *jaminan fidusia*, (bandung: citra aditiya bakti, 2003), hal.30

⁵ R.suharto. problematika akta jaminan fidusia. *Jurnal hukum* . vol.1 no.1 tahun 2017

Penyelenggaraan Sistem Pendaftaran Perwalian Secara Elektronik (Online), maka permohonan pendaftaran perwalian tidak lagi dilakukan secara daerah. kantor. Berbagai perubahan telah dilakukan pada proses pendaftaran wali. Sebelumnya, memang proses pendaftarannya dilakukan dengan cara offline. Seiring dengan kebutuhan orang-orang yang semakin meningkat dan perkembangan teknologi juga semakin bagus, maka pendaftaran permohonan jaminan fidusia kini dapat dilakukan dengan cara online. Mengenai pendaftaran perwalian, kantor pendaftaran perwalian di seluruh Indonesia sudah tidak menerima jika ada permohonan pendaftaran jaminan perwalian yang dilakukan dengan cara manual, namun akan memberikan informasi kepada pemohon yang mengajukan pendaftaran perwalian secara manual sehingga mereka dapat mengajukan permohonan secara elektronik sebagai bagian dari tugasnya menjadi Dan fungsi. Adanya Permohonan pendaftaran jaminan kepercayaan yang dilakukan secara elektronik hanya dapat diajukan kepada Direktorat AHU, namun sebagai prasyaratnya, kantor wilayah hanya menerima username dan password rahasia secara tertulis dari Direktorat AHU, tergantung pada bidang pekerjaannya. Untuk pendaftaran elektronik: Tanda tangan sertifikat keaslian.⁶

Selain itu, surat edaran ini juga memenuhi kewajiban yang ada di Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Perwalian, yang mengatur mekanisme administrasi pendaftaran jaminan perwalian secara elektronik pada bulan Maret. Ini akan disiarkan di televisi pada bulan Mei 2013 untuk menginformasikan kepada publik tentang hal itu dan memberikan rincian kepada Panitia Perwalian.

Surat kepercayaan tersebut harus ditandatangani oleh kepala kantor setempat atau pejabat yang berwenang di kantor setempat. Namun kenyataannya, sebagaimana disebutkan di atas, namun kantor wilayah Kementerian hak asasi manusia dan kementerian hukum sudah tidak lagi bertanggung jawab memproses adanya permohonan akta jaminan perwalian berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (3) UU Perwalian. Itu benar. Padahal, dalam UU Penjaminan diatur bahwa pendaftaran penjamin sebagai wali amanat dilakukan pada Biro Pendaftaran Perwalian yang berada di bawah yurisdiksi Kementerian Kehakiman. Di tingkat ibu kota negara, Kantor Pendaftaran Perwalian berkedudukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk peralihan kantor dari

⁶ Nishka Sylviana Hartoyo & Teddy Anggoro, *Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021* vol. 15

PROGEMATIKA PENERAPAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI ERA DIGITAL

Kantor Pendaftaran Perwalian ke Direktorat Jenderal Kehakiman berdasarkan Pasal 2 Perpres tersebut. Berdasarkan Keputusan pada Nomor 139 Tahun, 2000, didirikan kantor pendaftaran perwalian di setiap ibu kota provinsi dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Adanya Peraturan tersebut menimbulkan perbedaan karena Surat Edaran Direktorat Jenderal AHU Nomor AHU - 06.0T.03.01 Tahun 2013 menggantikan Undang-Undang pada Nomor (42) Tahun (1999) tentang Jaminan Fidusia. Timbul kesimpangsiuran mengenai tanggung jawab apa yang diemban oleh kantor wilayah Kementerian hak asasi manusia dan kementerian hukum . sejalan dengan kewajiban UU Perwalian dan Penjaminan mengenai proses penerimaan pendaftaran penjaminan perwalian dan pencetakan sertifikat penjaminan perwalian. Namun kemudian dicabut ketika e-notifikasi mulai berlaku.

Namun sejalan dengan aturan sebelumnya, Kementerian hak asasi manusia dan kementerian hukum juga mengesahkan Peraturan Kementerian hak asasi manusia dan Hukum No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Perwalian Secara Elektronik untuk melengkapi ketentuan mengenai jaminan perwalian secara elektronik. Bab 2 di Pasal 3 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Perwalian dengan cara Elektronik menjelaskan tata cara permohonan pendaftaran perwalian secara online, yaitu pendaftaran permohonan jaminan perwalian dengan cara elektronik, dimulai dengan pengisian formulir mengenai identitasnya si pemohon. Identitas pemberi titipan, identitas orang / Perusahaan yang penerima titipan, perjanjian titipan, jumlah pokok, nilai agunan, dan nilai barang yang dijaminakan dengan titipan tersebut.

Pemohon kemudian mencetak surat tanda pendaftaran yang memuat tentang nomor pendaftaran, tanggal penyelesaian permohonan, nama si pemohon, nama pencatat perwalian, jenis apa permohonan tersebut dan surat tanda pendaftaran disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Dan juga berapa Biaya pendaftaran permohonan jaminan fidusia tersebut.

Hal ini diperkuat lebih lanjut pada Bab 4 Pasal 3 tentang bagaimana Cara melakukan pendaftaran Perubahan Efek Fidusia dengan cara Elektronik yang menyatakan bahwa pendaftaran perubahan Efek Fidusia yang dilakukan dengan cara online memerlukan pengisian formulir permohonan perubahan yang mencantumkan nomor, tanggal, bulan, dan nomor. Dinyatakan bahwa hal ini dilakukan dengan: Tahun

penerbitan, nama lama, dan status notaris dari sertifikat keamanan terpercaya terakhir. Selanjutnya pemohon mencetak sertifikat pendaftaran perubahan jaminan perwalian yang terdiri dari nomor pendaftaran, nama si pemohon, tanggal penyelesaian permohonan, dan pemegang nama, sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan. Lembaga pendaftaran perwalian, jenis permohonan perubahan jaminan perwalian, dan biaya pendaftaran.

Pasal 6 Bab 4 tentang tata cara pendaftaran pembatalan agunan perwalian memberikan dasar bagi hapusnya utang-utang yang dijamin oleh wali amanat, pelepasan hak agunan oleh debitur, atau pembatalan agunan perwalian. Hilangnya kepercayaan keamanan terhadap barang yang dijadikan sebagai barang jaminan. Apabila terjadi pembatalan mendadak karena hapusnya hutang jaminan, orang yang hendak mengajukan permohonan pembatalan jaminan perwalian dengan cara tertulis (secara) kepada Mentri. Selain itu, permohonan pembatalan jaminan perwalian karena pelepasan hak akan kami tanggap dengan melampirkan bukti surat keterangan pembayaran debitur, sertifikat jaminan perwalian, dan bukti pembayaran biaya pembatalan. Kami menerbitkan sertifikat jaminan kepercayaan sesuai dengan persyaratan hukum.

Dengan berlakunya peraturan tersebut, layanan pendaftaran Perwalian yang saat ini dilakukan oleh Panitera Perwalian telah berubah dari pendaftaran tradisional pada Otoritas Jasa Perwalian menjadi alamat website <http://ahu.go.id> atau <http://fidusia.ahu.go.id>. Hal ini diatur didalam Pasal 14 Nomor Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999: ``Kantor Pendaftaran Perwalian menerbitkan sertifikat jaminan perwalian pada hari yang sama dengan waktu pendaftaran, dan ini adalah berdasarkan “presentasi kepada publik”. Menurut Jill Hurst-Wahl, “Aset digital dan pemegang fidusia dengan akses dan kendali atas aset digital” (Kennedy, 2013) diartikan sebagai “pemegang fidusia dapat mengontrol dan mengakses akun aset digital.”

Akibat hukum dari pendaftaran jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam system online tidak mempunyai manfaat pendaftaran:

1. Mempunyai hak mendahului (*preference*)
2. Mempunyai kekuatan eksekutorial ⁷.

⁷ Ida ayu made idyari & Nyoman shirta & made sarjana. Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia online. *Jurnal ilmiah prodi magister kenotariatan*, 2017-2018 hal.268

PROGEMATIKA PENERAPAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI ERA DIGITAL

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan Pendaftaran perwalian elektronik secara online adalah bentuk peningkatan dalam pelayanan pendaftaran perwalian dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya yaitu sistem yang masing dilakukan secara manual dimana pendaftaran perwalian secara manual pada awalnya dilakukan di Kantor Pendaftaran Perwalian Jamina di daerah masing-masing. Kini dapat dilakukan secara elektronik secara online hanya dengan mengunjungi website resmi Pendaftaran Fidusia yaitu <http://fidusia.ahu.go.id>.

Saran

1. Pemerintah khususnya Kementerian hak asasi manusia dan kementrian hukum diharapkan memperbaiki sistem pendaftaran kepercayaan dan jaminan online agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pendaftaran kepercayaan dan jaminan yang dilakukan dengan cara online tersebut.
2. Mengingat besarnya tugas tugas yang dilimpahkan kepada Notaris terkait pendaftaran jaminan perwalian yang dilakukan dengan cara online, maka hendaknya Notaris harus lebih teliti dan hati hati, cermat dan cermat dalam membuat akta, membaca akta dan memasukkan data dengan sebaik-baiknya. Notaris harus memverifikasi data setidaknya dua hingga tiga kali sebelum menyerahkannya ke database jaminan escrow online.

DAFTAR REFERENSI

- Fuady Munir, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ida ayu made idyari & Nyoman shirta & made sarjana. Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia online. *Jurnal ilmiah prodi magister kenotariatan*
- Munir Fuady, *jaminan fidusia*, (bandung: citra aditya bakti)
- Musaddad Ahmad, *hukum jaminan perspektif hukum positif dan hukum islam* : literasi Nusantara
- R.suharto. problematika akta jaminan fidusia. *Jurnal hukum* . vol.1 no.1
- Supanto, *hukum jaminan fidusia prinsip publishitas pada jaminan fidusia*, (Garudhawaca)

Sylviana Hartoyo Nishka & Anggoro teddy, *Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia
secara Elektronik oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM
Nomor 25*